BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam, institusi perkawinan memiliki posisi yang sangat penting dan mendapat perhatian besar. Oleh sebab itu, setiap pernikahan idealnya dibangun di atas landasan nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan pertimbangan sosial yang bijak. Islam memandang perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) serta bentuk komitmen serius dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, sekaligus sebagai sarana pembentukan pribadi yang bermartabat. Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan mulia, seperti memperoleh keturunan dan membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akan tercapai apabila suami dan istri saling mencintai dan menyayangi yang dalam istilah Islam dikenal sebagai *mawaddah wa rahmah*. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara bertanggung jawab. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, diharapkan rumah tangga yang dibangun dapat menghadirkan ketenangan batin (*sakinah*) dan kehidupan yang harmonis..¹

Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk akad yang sah secara syar'i, yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram. Akad tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi juga memuat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam kehidupan rumah tangga..² Ikatan ini menjadi fondasi untuk membangun kebersamaan yang saling

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut : Darul Fikr, 1983), h. 5.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 374.

menopang dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek spiritual, emosional, maupun sosial. Lebih dari itu, perkawinan dalam Islam juga dipahami sebagai perjanjian suci yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), yang menandai dimulainya kehidupan bersama yang sah menurut agama dan hukum. Tujuan utama dari ikatan ini adalah menciptakan sebuah keluarga yang utuh dan berkelanjutan, di mana cinta, kasih sayang, dan keharmonisan menjadi nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi. Perkawinan diharapkan menjadi sarana untuk meraih ketentraman lahir dan batin, serta menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan bersama dalam bingkai kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT.³

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam ajaran Islam dipandang sebagai sebuah perjanjian yang sangat kuat atau kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), yang dilangsungkan dengan niat tulus untuk menaati perintah Allah SWT. Dalam pandangan ini, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan ideal, yaitu keluarga yang diliputi ketenangan (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), yang menjadi dasar dalam membangun rumah tangga Islami.

Sementara itu, dalam kerangka hukum nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menekankan pada pentingnya keterpaduan antara aspek fisik, emosional, dan spiritual dalam relasi suami istri, serta menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan utama dalam kehidupan rumah tangga.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1-2.

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diposisikan sebagai institusi yang sangat penting dan memiliki dimensi sakral. Keduanya tidak hanya memandang pernikahan sebagai kontrak sosial semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam menempatkan keluarga sebagai fondasi utama masyarakat yang sehat dan beradab. Dengan demikian, setiap pelaksanaan perkawinan harus dilandasi oleh niat yang benar, kepatuhan terhadap aturan agama dan negara, serta komitmen untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan.

Dalam ajaran Islam, dikenal dua jenis sistem perkawinan yang sah, yaitu monogami dan poligami. Monogami adalah bentuk pernikahan di mana seorang pria menikahi satu orang wanita dalam satu ikatan yang sah secara agama dan hukum. Sementara itu, poligami merujuk pada praktik seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan, dengan batasan maksimal empat istri dan syarat-syarat ketat sebagaimana diatur dalam hukum Islam, seperti keadilan dalam perlakuan dan pemberian nafkah.

Jika ditinjau dari perspektif antropologi sosial, poligami bukanlah fenomena baru. Pola ini telah lama menjadi bagian dari struktur keluarga di berbagai masyarakat tradisional, bahkan sejak zaman kuno. Dalam konteks ini, praktik poligami sering kali dikaitkan dengan alasan-alasan sosial dan ekonomi, seperti memperkuat kedudukan keluarga, menjaga harta warisan, atau memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat agraris. Selain itu, tradisi patriarki yang mendominasi dalam sebagian besar komunitas juga menjadi faktor penting yang menopang keberlangsungan praktik poligami. Poligami dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam keluarga maupun masyarakat.

Dengan demikian, poligami dalam Islam bukan hanya memiliki

dasar teologis, tetapi juga tidak lepas dari pengaruh sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, dalam penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, tanggung jawab moral, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, baik dari sudut pandang agama maupun hukum modern.

Di Indonesia, meskipun prinsip utama yang dianut dalam sistem hukum perkawinan adalah monogami, ruang untuk praktik poligami tetap diberikan dengan sejumlah batasan ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), di mana ayat (1) menegaskan bahwa idealnya seorang pria hanya memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya satu suami. Namun pada ayat (2), dijelaskan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mendapatkan persetujuan dari istri pertama dan memperoleh izin resmi dari pengadilan agama. Dengan demikian, undang-undang memberikan jalan hukum bagi poligami, namun tetap dengan pengawasan ketat agar tidak melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga yang diantaranya adalah Secara prinsip, dalam suatu ikatan perkawinan, seorang suami hanya diperbolehkan untuk memiliki satu orang istri, demikian pula seorang istri hanya diizinkan memiliki satu orang suami. Pola ini dikenal sebagai monogami dan menjadi dasar dalam sistem perkawinan yang ideal menurut hukum dan norma sosial yang berlaku. Namun, terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri (poligami), asalkan memperoleh izin dari pengadilan. Izin tersebut hanya dapat diberikan jika ada alasan yang sah dan disertai persetujuan dari pihak-pihak terkait, termasuk istri pertama, serta dipertimbangkan secara objektif oleh institusi peradilan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Poligami merupakan fenomena sosial yang masih dijumpai dalam

⁴ Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No,1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

praktik pernikahan di masyarakat, meskipun penerimaannya secara terbuka masih terbatas pada kelompok tertentu. Secara linguistik, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu "polygamie", yang terdiri dari kata "poly" yang berarti banyak dan "gamos" yang berarti perkawinan atau suami. Dengan demikian, secara etimologis poligami merujuk pada situasi di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam hubungan pernikahan yang sah secara hukum dan agama.⁵ Dalam kenyataan sosial, praktik poligami sering kali memicu penolakan, terutama dari kaum perempuan, yang memiliki beragam alasan baik secara emosional, moral, maupun sosial. Keberatan ini biasanya berkaitan dengan kekhawatiran akan ketidakadilan, luka batin, atau ketimpangan relasi dalam rumah tangga. Namun, tidak sedikit pula perempuan yang bersikap terbuka terhadap praktik ini, selama dijalankan dengan pertimbangan matang dan memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya, terdapat perempuan yang tidak keberatan suaminya berpoligami asalkan mereka dilibatkan dalam proses pemilihan istri kedua, dengan tujuan menjaga keharmonisan dan menghindari konflik dalam keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa pandangan terhadap poligami sangat beragam dan kompleks, tergantung pada konteks sosial, nilai-nilai pribadi, dan dinamika relasi dalam keluarga.⁶

Praktik poligami telah berlangsung sejak zaman kuno dan tidak dapat dianggap sebagai ciri khas semata dari budaya Timur. Catatan sejarah menunjukkan bahwa masyarakat di berbagai belahan dunia, seperti Mesir, Prancis, Suriah, Rusia, dan Jerman, juga mengenal serta menerapkan sistem poligami. Para sejarawan dan sosiolog berpendapat bahwa poligami telah menjadi bagian dari perjalanan panjang peradaban manusia dan muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing.

⁵ S. R. Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2004), h. 2.

⁶ Reza Fitra Ardhian, dkk, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*, Privat Law Vol. III No 2, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015), h. 100.

Pada periode-periode awal, poligami sering kali berhubungan erat dengan ketimpangan gender dan dianggap sebagai bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki yang memiliki kekuatan secara ekonomi maupun politik, khususnya para penguasa dan bangsawan—cenderung mengambil lebih dari satu istri sebagai sarana untuk memenuhi hasrat pribadi dan memperluas pengaruh sosial mereka. Sebagai ilustrasi, dalam komunitas suku-suku di Nouvella Caledonia yang merupakan wilayah jajahan Prancis, terdapat kebiasaan bagi pria untuk menikahi banyak perempuan, bahkan lebih dari sepuluh, dengan tujuan utama untuk mendapatkan tenaga kerja di ladang. Di lingkungan tersebut, jumlah istri bahkan dijadikan tolok ukur prestise dan martabat sosial seorang pria.

Fenomena serupa juga ditemukan di masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, di mana tidak ada batasan jumlah istri yang bisa dinikahi oleh seorang laki-laki, asalkan ia memiliki kemampuan fisik dan kekayaan untuk menafkahi mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa praktik poligami pada masa lampau lebih berorientasi pada kekuasaan, kepemilikan, dan status sosial, serta belum memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan sebagai subjek dalam hubungan perkawinan.

Ketika ajaran Islam datang dengan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, praktik poligami ini mulai dibatasi secara tegas karena dalam ajaran agama Islam sejatinya aturan perkawinan bahwa laki-laki diperbolehkan untuk memiliki empat orang istri, dan seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Kepemilikan istri yang lebih dari satu tersebut dalam syariat Islam hanya diperkenankan jika seorang suami mampu berlaku adil.

Hingga saat ini, poligami masih ditemukan di berbagai negara, termasuk kawasan Timur Tengah, beberapa wilayah di Asia dan Afrika, serta di komunitas tertentu di Amerika Utara dan Eropa. Bahkan sejumlah suku di Australia, Tasmania, Selandia Baru, dan Madagaskar juga masih mempraktikkan bentuk-bentuk poligami. Oleh karena itu, anggapan bahwa poligami merupakan karakteristik eksklusif negara-negara Timur, dan

monogami adalah milik negara-negara Barat, merupakan generalisasi yang tidak sepenuhnya tepat.

Di Indonesia, praktik poligami tidak terbatas pada kalangan masyarakat umum, tetapi juga ditemukan di antara pejabat, selebriti, hingga tokoh agama. Berdasarkan data tahun 2001, tercatat sebanyak 1.130 permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama di seluruh wilayah Indonesia, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 860 permohonan dikabulkan. Pada tahun 2005, jumlah permohonan mengalami penurunan menjadi 989, dengan 803 permohonan yang mendapat persetujuan, sementara sisanya ditolak atau belum mendapat keputusan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah permohonan mengalami penurunan, praktik poligami tetap berlangsung dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Meski poligami diizinkan dalam Islam, dalam praktiknya banyak penyimpangan yang terjadi. Poligami sering disederhanakan sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga dianggap boleh dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat. Akibatnya, sebagian pelaku menjadikan poligami sebagai sarana untuk memenuhi keinginan pribadi, bukan sebagai wujud tanggung jawab sosial dan keagamaan.

Sebagai bentuk sistem perkawinan, poligami tetap harus memenuhi fungsi-fungsi dasar dari sebuah keluarga. Menurut Duvall dan Miller, pernikahan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membangun cinta dan kasih sayang, menciptakan rasa aman, memenuhi kebutuhan emosional dan sosial, serta memberikan pengawasan dan pendidikan nilai-nilai moral. Dalam konteks poligami, pemenuhan fungsi-fungsi tersebut menjadi lebih kompleks. Seorang suami dituntut untuk mengelola lebih dari satu rumah tangga secara adil, baik dalam hal waktu, perhatian, keuangan, maupun emosi.

Apabila dikaji secara mendalam, sebenarnya konsep poligami bermula karena atas dasar pertimbangan sosial seperti contohnya menolong

janda miskin yang tidak mampu menghidupi kehidupannya, menolong hidup anak yatim, dan sebagainya. Tujuan tersebut bahkan mencerminkan nilai-nilai kasih sayang dan keadilan, sehingga suami hanya diperkenankan untuk memiliki istri dengan maksimal empat dengan syarat dapat berlaku adil satu sama lain dan tidak memiliki hubungan sedarah antara keduanya.

Poligami menjadi salah satu topik yang kerap memicu perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat, karena menyentuh aspek moral, hukum, dan kesetaraan gender. Perbedaan pandangan mengenai praktik ini muncul dari berbagai kalangan, dengan argumen yang beragam, khususnya berkaitan dengan dampaknya terhadap prinsip keadilan dan hak-hak individu. Kelompok yang menolak poligami menilai bahwa praktik ini bersifat diskriminatif terhadap perempuan, karena berpotensi menciptakan ketimpangan relasi dalam rumah tangga dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka berpendapat bahwa poligami cenderung merugikan pihak istri, baik secara emosional maupun sosial, serta menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Sebaliknya, kelompok pendukung poligami berargumen bahwa praktik tersebut memiliki dasar historis dan keagamaan yang kuat. Bagi mereka, poligami bukan sekadar bentuk kebebasan laki-laki, tetapi merupakan solusi sosial dan moral, terutama dalam konteks menjaga martabat perempuan agar tidak terjerumus dalam perzinahan atau kehidupan yang melanggar norma agama. Mereka juga menekankan bahwa poligami yang dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan sesuai syariat tidak menyalahi prinsip etis dan hukum. Meskipun perdebatan ini terus berlangsung, secara normatif sistem hukum Indonesia tetap mengakomodasi kemungkinan praktik poligami, terutama dalam lingkup umat Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan hukum dengan sejumlah persyaratan ketat, seperti persetujuan istri pertama dan izin dari pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya melarang poligami, namun

menempatkan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Perbedaan pandangan yang mencolok mengenai praktik poligami ini menjadi latar belakang bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam. Dalam upaya memperkaya perspektif dan meminimalkan bias informasi, peneliti merujuk pada sejumlah studi terdahulu yang merekomendasikan pelibatan berbagai partisipan dalam penelitian tentang poligami. Hal ini mencakup tidak hanya satu narasumber utama, tetapi juga melibatkan pihak-pihak terkait seperti istri pertama, istri-istri lainnya, dan suami sebagai pelaku utama. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika kehidupan rumah tangga dalam poligami. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mengungkap dan memahami secara mendalam pengalaman subjektif para pelaku poligami dalam satu unit keluarga.

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, pernikahan diatur secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pelaksanaannya diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua regulasi ini menjadi landasan utama dalam menetapkan prosedur, persyaratan, serta tujuan dari suatu ikatan perkawinan. Di lingkungan peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk persoalan permohonan poligami oleh laki-laki yang telah beristri.

Secara prinsip, Undang-Undang Perkawinan menempatkan monogami sebagai bentuk perkawinan yang ideal. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri, dan sebaliknya, seorang perempuan hanya boleh bersuami satu orang. Penekanan pada asas monogami ini mencerminkan niat pembuat undang-undang untuk membangun kehidupan rumah tangga yang berlandaskan kesetaraan, keharmonisan, serta ikatan eksklusif antara pasangan suami dan istri.

Kendati demikian, undang-undang ini juga membuka kemungkinan bagi praktik poligami dalam kondisi tertentu. Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri hanya jika mendapat izin dari pengadilan. Izin tersebut bukanlah formalitas semata, melainkan mensyaratkan terpenuhinya syarat-syarat substantif, seperti persetujuan dari istri pertama secara sukarela tanpa paksaan, serta penerimaan dari calon istri kedua atas kondisi tersebut. Ketentuan ini mencerminkan kehati-hatian negara dalam mengatur poligami agar tidak merugikan salah satu pihak, terutama perempuan, dan tetap menjamin perlindungan hukum serta keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, regulasi mengenai poligami dalam sistem hukum Indonesia tidak semata melegitimasi praktik tersebut secara bebas, melainkan memberikan kerangka hukum yang ketat. Tujuannya adalah agar keputusan untuk berpoligami tidak didasarkan pada keinginan sepihak, melainkan dipertimbangkan secara matang dengan melibatkan seluruh pihak yang terdampak, serta diuji kelayakannya oleh lembaga peradilan.

Penerapan poligami di Indonesia berdasarkan Undang-Undang tersebut disertai dengan sejumlah ketentuan yang ketat dan selektif, terutama dalam proses pemberian izin. Hal ini bertujuan agar praktik poligami benar-benar dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tetap sejalan dengan esensi dan tujuan utama dari sebuah pernikahan.

Pada 16 November 2021, kanal YouTube **Narasi Newsroom** menerbitkan sebuah laporan jurnalistik berjudul "*Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*". Video tersebut membahas praktik pelatihan poligami yang dilakukan secara komersial, menyoroti maraknya layanan bimbingan bagi pria yang ingin melakukan poligami dengan membayar sejumlah biaya. Fenomena ini memicu kontroversi karena dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma etika yang berlaku di masyarakat.

Fenomena mentoring poligami berbayar ini mencerminkan adanya celah dalam sistem hukum dan pengawasan terhadap praktik perkawinan di

Indonesia. Di satu sisi, keberadaan layanan semacam ini menunjukkan bahwa ada permintaan yang cukup tinggi di masyarakat untuk memperoleh “pembenaran” atau justifikasi praktik poligami, meskipun tidak selalu sejalan dengan persyaratan ketat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, praktik ini juga memperlihatkan adanya komodifikasi nilai-nilai agama dan institusi keluarga, di mana poligami tidak lagi dilandasi pertimbangan moral, spiritual, atau kemaslahatan, melainkan menjadi ajang komersialisasi yang mereduksi makna sakral pernikahan. Kondisi ini menuntut respons yang serius dari negara, khususnya lembaga keagamaan dan lembaga hukum, agar regulasi yang berlaku dapat ditegakkan serta masyarakat tidak disesatkan oleh narasi-narasi yang menyimpang.⁷ Video YouTube tersebut dengan cepat menjadi viral hanya dalam beberapa hari setelah diunggah, disebabkan oleh sejumlah pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh sang mentor. Salah satu pernyataan yang menarik perhatian penulis adalah klaim bahwa dalam praktik poligami, persetujuan dari istri pertama tidak diperlukan. Pernyataan ini disampaikan pada menit kesepuluh dalam video tersebut. Ungkapan tersebut segera memicu reaksi negatif dari para penonton, yang disampaikan melalui kolom komentar. Banyak yang menilai bahwa pernyataan tersebut tidak hanya menyakiti perasaan kaum perempuan, tetapi juga dianggap merendahkan martabat perempuan secara umum.

Penyebaran ajaran yang membolehkan pelaksanaan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri pertama membawa risiko yang cukup serius, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan kedua yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah, seperti

⁷ Narasi Newsroom, *Mengungkap Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*, diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w&t=1131s&ab_channel=NarasiNewsroom, pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 20:00 WIB.

tidak mendapatkan izin dari pengadilan, dikenal sebagai poligami sirri. Fenomena ini masih menjadi perdebatan hangat di masyarakat Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada 8 Oktober 2021, Drs. Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama di Cianjur, menegaskan bahwa seorang pria yang menikah lagi sementara pernikahan pertamanya masih berlaku secara sah melakukan pelanggaran hukum dan pernikahan tersebut tidak diakui secara legal oleh negara. Bahkan, Pengadilan Agama wajib menolak permohonan isbat nikah untuk pernikahan semacam itu. Sikap ini juga ditegaskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa permohonan pengesahan nikah atas pernikahan poligami sirri tidak dapat diterima, meskipun diajukan dengan alasan demi kepentingan anak-anak.⁸

Praktik poligami secara sirri juga dijumpai di kawasan pesisir Panyipatan, terutama di Desa Batakan dan Desa Tanjung Dewa, yang terletak di Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut. Fenomena poligami di daerah ini menunjukkan kekhasan tersendiri yang membedakannya dari konteks sosial lain di Indonesia. Masyarakat pesisir Panyipatan tampak menunjukkan sikap yang cenderung permisif terhadap praktik poligami. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat setempat dipandang memiliki pandangan terbuka dan tingkat toleransi yang tinggi terhadap praktik beristri lebih dari satu. Hal ini membuat poligami tidak dipandang sebagai sesuatu yang menyimpang, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang diterima secara kultural.

Menariknya, sikap masyarakat ini juga tercermin dalam pola pendidikan dan pembentukan mental perempuan di wilayah tersebut. Sejak dini, para perempuan dibekali kesiapan psikologis dan pemahaman bahwa kemungkinan dipoligami adalah sesuatu yang wajar. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang secara aktif mempersiapkan diri secara ekonomi untuk

⁸ SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, h. 16.

menghadapi kemungkinan tersebut. Fenomena ini menciptakan profil perempuan tangguh yang mandiri secara finansial dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara otonom, meskipun suami tidak lagi berperan aktif dalam memberikan nafkah. Meskipun dalam kondisi seperti ini secara normatif dapat dianggap rentan, kenyataannya banyak rumah tangga poligami di wilayah ini yang tetap bertahan dan tidak berujung pada perceraian. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya bentuk adaptasi sosial dan kultural yang unik terhadap praktik poligami, yang dapat menjadi objek kajian lebih lanjut dari perspektif sosiologi hukum maupun antropologi budaya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti dari pelaku dan juga masyarakat desa setempat dan didorog dari informasi beberapa tokoh yang bersangkutan, disimpulkan terdapat tokoh yang melakukan poligami, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel Data Pelaku Poligami

No.	Inisial Nama	Usia	Tahun berpoligami
1	U	55	2000
2.	HAS	70	2002
3.	HR	47	2009/2022
4.	A1	44	2021
5.	H1	50	2015
6.	B1	58	2007
7.	K1	44	2019
8 .	B2	60	2007
9.	K2	45	2020
10.	H2	65	2010
11.	HA	54	2010/2020
12.	D	49	1990/2002

13.	A2	41	2023
-----	----	----	------

Oleh karena permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam guna dapat melakukan penelusuran secara detail mengenai proses-proses dari kegiatan perkawinan khususnya perkawinan poligami beserta kehidupan rumahtangganya pada wilayah Pesisir Panyipatan kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan dengan judul *“Perilaku Poligami dan Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Pesisir Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut)”*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku poligami masyarakat Pesisir Panyipatan, kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Pesisir Panyipatan, kabupaten Tanah Laut tentang poligami?
3. Bagaimana peran norma agama, budaya lokal dan regulasi mempengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap poligami?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni dimana telah disesuaikan dengan fenomena yang diuraikan di latar belakang dan rumusan masalah di atas. Sehingga dapat menjadi tujuan permasalahan dalam penelitian ini, guna untuk mengetahui:

1. Perilaku poligami masyarakat Pesisir Panyipatan, kabupaten Tanah Laut.
2. Persepsi masyarakat Pesisir Panyipatan, kabupaten Tanah Laut tentang poligami.
3. Peran norma agama, budaya lokal dan regulasi mempengaruhi penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap poligami.

D. Manfaat penelitian

Setiap kegiatan akan mencapai hasil yang optimal apabila memiliki arah, tujuan, dan maksud yang jelas. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan sebuah penelitian, yang membutuhkan tujuan yang terstruktur agar prosesnya berjalan secara sistematis, terfokus, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang dengan tujuan sebagai berikut:

Dari sisi teori, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum Islam. Kajian ini diharapkan menjadi referensi yang berguna bagi masyarakat, terutama dalam memahami pelaksanaan perkawinan poligami. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur ilmiah di bidang tersebut sekaligus mendorong peneliti lain untuk mengeksplorasi topik yang sama dalam konteks hukum dan sosial.

Dari aspek praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku perkawinan poligami, khususnya pria yang sedang atau akan menjalani poligami. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan poligami dalam kehidupan berkeluarga.

E. Definisi Operasional

Perilaku, secara bahasa diartikan sebagai tindakan, pola tingkah laku, atau perbuatan yang berasal dari kata "laku". Sedangkan menurut para ahli yang mempelajari ilmu perilaku, terdapat dua metode untuk memahami tingkah laku seseorang. Metode pertama adalah dengan mengamati aktivitas yang dilakukan secara langsung (observasi), lalu menganalisis pola kecenderungan tersebut secara empiris. Metode kedua didasarkan pada teori-teori perilaku manusia yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan perilaku yang dapat muncul.⁹ Perilaku yang dimaksud pada penelitian ini adalah tingkah laku para pelaku poligami, baik suami maupun istri yang berada dalam lingkup keluarga poligami.

Persepsi merupakan proses di mana seseorang mengamati, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap informasi atau rangsangan yang diterima melalui indera. Persepsi tidak hanya sebatas melihat atau mendengar saja, tetapi juga melibatkan bagaimana otak mengolah dan menilai sesuatu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, kepercayaan, serta konteks sosial dan budaya. Kata persepsi sendiri berasal dari bahasa Latin *perceptio*, yang berarti "penerimaan" atau "pengamatan". Persepsi yang dimaksud pada penelitian ini ialah pendapat orang-orang atau masyarakat sekitar yang menyaksikan dan mendengarkan secara langsung terhadap orang-orang yang melaksanakan perkawinan poligami yang kemudian menjadi rumah tangga poligami.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan saling mengikat antara suami dan istri, yang bertujuan untuk menjalankan perintah serta anjuran dari Allah SWT agar kehidupan

⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (t.p.: Jakarta, t.th), h. 103-120.

rumah tangga dapat berlangsung dengan baik dan harmonis sesuai dengan syariat agama. Di Indonesia, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya melibatkan aspek lahiriah atau fisik semata, tetapi juga mengandung unsur rohani yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sakral antara kedua pasangan.¹⁰

Poligami, poligami dapat diartikan sebagai sistem perkawinan yang mana di dalamnya meneapkan bahwa salah satu pihak memiliki,¹¹ mengawini¹² dua orang istri atau lebih yang terjadi dalam satu kurun waktu dan terdapan konsep bermadu. Dalam ilmu Fiqih Munakahat yang dimaksudkan dengan poligami yakni jika seorang pria memiliki istri lebih dari satu orang, akan tetapi terdapat pembatasan yakni maksimal empat orang, maka jika seorang pria tersebut beristri lebih dari empat orang maka ia mengingkari kebaikan yang telah diperisyaratkan oleh Allah SWT perihal kemaslahatan kehidupan suami istri.¹³

Perkawinan Poligami, Perkawinan poligami merupakan bentuk pernikahan dimana seorang pria mempersunting lebih dari seorang wanita yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan padasaat pria masih memiliki hubungan pernikahan yang sah secara agama dan hukum dengan istri pertamanya tanpa adanya perceraian, yang mana hal tersebut disesuaikan kembali dengan hukum yang berlaku.¹⁴

Rumah Tangga Poligami, Rumah tangga poligami merujuk pada suatu keluarga di mana seorang suami menjalani kehidupan berumah tangga dengan lebih dari satu istri, yang juga dikenal sebagai perkawinan banyak istri. Poligami ini merupakan suatu bentuk struktur keluarga yang

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*....., h. 2.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Ed. II (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 779.

¹² Lailah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (t.t.: Palanta, t.th), h. 504.

¹³ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 131.

¹⁴ S. R. Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*,h. 2.

diizinkan dalam beberapa budaya dan agama, namun sering menimbulkan berbagai dinamika sosial dan psikologis. Dari segi sosial, poligami dapat mempengaruhi keseimbangan hubungan antar anggota keluarga serta menimbulkan tantangan dalam pembagian perhatian dan sumber daya. Secara psikologis, keberadaan lebih dari satu pasangan dapat menimbulkan rasa cemburu, konflik, atau ketegangan emosional yang memerlukan manajemen dan komunikasi yang baik agar rumah tangga tetap harmonis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum, sosial, dan budaya sangat penting dalam menjalankan rumah tangga poligami agar dapat memenuhi tujuan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang tinggal di wilayah tertentu dan menjalani kehidupan secara bersama-sama dengan saling mendukung, membentuk sebuah sistem sosial yang terstruktur. Dalam sistem ini, mereka berinteraksi satu sama lain, berbagi nilai-nilai, norma, dan budaya yang sama, serta memiliki tujuan atau kepentingan bersama. Istilah "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu *musyarakah*, yang berarti partisipasi atau keterlibatan bersama. Oleh karena itu, masyarakat dapat dipahami sebagai kelompok orang yang saling terhubung dan aktif berkontribusi dalam kehidupan bersama mereka.

Pesisir merupakan kawasan peralihan antara daratan dan laut yang meliputi area pantai serta daerah yang langsung dipengaruhi oleh fenomena laut seperti pasang surut, angin laut, serta aktivitas ekonomi dan sosial yang terkait dengan kelautan. Dalam konteks penelitian ini, istilah pesisir merujuk pada daerah pemukiman yang terletak di sepanjang garis pantai Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, di mana masyarakatnya menjalin interaksi yang erat dengan lingkungan laut dan memanfaatkan sumber daya pesisir secara intensif.

Masyarakat Pesisir adalah kelompok sosial yang menetap dan hidup di wilayah pesisir, dengan pola hidup, struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan sistem ekonomi yang dibentuk oleh keterkaitan mereka dengan

lingkungan laut dan pantai. Dalam penelitian ini, masyarakat pesisir mengacu pada penduduk desa-desa seperti Batakan, Tanjung Dewa, dan sekitarnya, yang memiliki ciri khas: keterlibatan dalam sektor perikanan, perdagangan, pertanian lahan pantai, serta norma sosial dan adat yang unik, termasuk dalam hal praktik dan persepsi terhadap poligami.

F. Penelitian Terdahulu

studi literatur merupakan tahap krusial untuk memetakan penelitian-penelitian yang sudah ada agar terhindar dari pengulangan topik. Setelah melakukan pencarian dan analisis, penulis menemukan beberapa penelitian, baik berupa tesis maupun karya ilmiah lainnya, yang membahas mengenai poligami. Namun, lokasi atau wilayah yang menjadi fokus dalam studi ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa hasil temuan dari studi terdahulu akan dijelaskan lebih lanjut pada paragraf berikutnya..

1. **Jurnal Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 2015 dengan judul Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama** oleh Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah dasar-dasar hukum mengenai poligami dari sudut pandang hukum Islam serta hukum positif di Indonesia, sekaligus mengevaluasi urgensi pemberian izin poligami melalui Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan penerapan beragam teori khususnya dalam konteks keselarasan antara hukum agama dan hukum negara. Namun, pendekatan tersebut terkadang kurang menangkap dinamika sosial yang terjadi di lapangan, terutama pada masyarakat pesisir yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik terkait praktik poligami. Oleh karena itu, penelitian yang fokus pada fenomena sosial di masyarakat pesisir seperti Panyipatan memberikan nilai tambah dengan menggali realitas praktik dan

persepsi masyarakat secara langsung. Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual, yang pada akhirnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan bagi masyarakat yang menjalankan poligami.

2. Tesis yang kemudian menjadi jurnal di Risalah HUKUM fakultas Hukum Ummul – Desember 2008 yang berjudul **Konsep Poligami Dalam Islam** karangan Hariyanti. Hariyanti melakukan penelitian yang hanya berbicara tentang poligami secara hukum Islam saja secara mendalam dan menggunakan metode penelitian kepustakaan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang meneliti langsung kepada para pelaku maupun masyarakat sekitarnya yang hidup di Pesisir Panyipatan.
3. Tesis Lai Noviana, **“Persoalan Praktik Poligami Dalam Masyarakat Islam”**¹⁵ Praktik poligami menjadi isu yang sangat sensitif dan kontroversial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengatur prosedur pelaksanaannya dengan menetapkan persyaratan yang bersifat alternatif dan kumulatif yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang hendak menjalankan poligami. Hingga kini, Undang-Undang Perkawinan belum mengatur secara eksplisit sanksi pidana bagi suami yang melaksanakan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Namun, rencana pemberlakuan sanksi tersebut telah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU HMPA) tahun 2008, yang sampai saat ini masih belum disahkan. Peraturan yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang pembatalan perkawinan apabila syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diperkuat oleh putusan Mahkamah

¹⁵ Lai Noviana, *Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam*, tesis (Malang: UNI Maulana Malik Ibrahim, 2012).

Agung Nomor 2039 K/Pdt/1997. Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa hal penting, yaitu: (1) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya berlandaskan prinsip monogami, namun membuka kemungkinan poligami apabila disetujui oleh para pihak terkait; (2) Pelaksanaan poligami dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak memenuhi atau melanggar syarat-syarat dan alasan yang telah ditentukan oleh otoritas yang berwenang, dengan penerapan hukuman ta'zir; (3) Pemberian sanksi atas poligami tanpa izin Pengadilan Agama didasarkan pada prinsip terbentuknya masalah, yakni terciptanya keluarga sakinah yang harmonis dan sejahtera. Studi yang dilakukan oleh Lai Noviana menitikberatkan pada ketidakjelasan regulasi dan peraturan terkait poligami di Indonesia. Sementara itu, penelitian dalam tulisan ini lebih memusatkan perhatian pada bagaimana masyarakat di wilayah Pesisir Panyipatan memandang fenomena poligami..

4. Tesis yang telah diselesaikan oleh M. Hanif Yusoh dari Universitas Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2015, berjudul: **“Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa La’han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan)”**. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa masyarakat setempat memandang poligami sebagai sunnah Rasulullah Saw. yang wajib dilaksanakan. Mereka juga meyakini bahwa meskipun pernikahan poligami tidak dicatat secara resmi, pernikahan tersebut tetap dianggap sah asalkan telah sesuai dengan ketentuan agama. Keyakinan inilah yang menjadi alasan utama bagi masyarakat Desa La’han untuk menjalankan praktik poligami. Perbedaan utama antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi studi serta perbedaan pola pikir dan perspektif masyarakat yang menjadi objek kajian.
5. Tesis lainnya juga telah diselesaikan oleh Sofyan Afandi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2013, berjudul **“Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota**

Malang)". Tesis ini membahas berbagai faktor yang melatarbelakangi praktik poligami di masyarakat, dengan fokus utama pada aspek substansi hukum. Secara normatif, Islam memberikan ruang bagi poligami, dan ruang ini diperkuat oleh keberadaan Undang-Undang yang memungkinkan praktik tersebut dilakukan, meskipun disertai dengan syarat dan prosedur hukum yang ketat. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas aturan ini seringkali diimbangi dengan kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih mempermudah izin poligami daripada mengabulkan permohonan cerai, dengan alasan bahwa rasa keadilan dalam masyarakat tidak selalu dapat diakomodasi melalui perangkat hukum yang berlaku secara formal. Selain itu, dalam pandangan sebagian masyarakat, poligami dipersepsikan sebagai bentuk perkawinan yang sah menurut ajaran Islam dan dianggap sebagai jalan yang sah untuk menghindari perbuatan maksiat, seperti perselingkuhan atau hubungan di luar nikah. Analisis ini menunjukkan bahwa praktik poligami tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor religius dan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh interpretasi sosial dan budaya masyarakat setempat. Di beberapa komunitas, poligami telah terinternalisasi sebagai bagian dari norma sosial yang diterima, selama memenuhi syarat keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi formal sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai lokal dan persepsi keagamaan yang membentuk praktik sehari-hari. Penelitian ini juga membedakan dirinya dari penelitian lain melalui perbedaan lokasi penelitian, karakteristik masyarakat, serta kerangka berpikir yang digunakan oleh masyarakat dalam menilai praktik poligami. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi dalam memahami praktik poligami secara lebih holistik, tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan moralitas masyarakat.

6. Tesis lainnya juga telah diselesaikan oleh Andri Vidiyanto dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015, berjudul: **"Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)"**. Tesis ini mengkaji

alasan masyarakat melakukan praktik poligami yang didasarkan pada faktor hukum substansial, dimana secara normatif Islam memberikan dukungan, dan negara pun memberikan perlindungan melalui undang-undang yang memungkinkan pelaksanaannya meskipun regulasinya cukup kompleks. Selain itu, faktor lain yang ditemukan adalah kecenderungan aparat penegak hukum yang lebih memudahkan proses perkawinan poligami dibandingkan perceraian, dengan alasan bahwa keadilan sulit diterapkan hanya berdasarkan perangkat hukum yang ada. Selanjutnya, masyarakat memandang poligami sebagai bentuk perkawinan yang diizinkan dalam Islam dan juga sebagai cara untuk menghindari perbuatan maksiat. Perbedaan antara penelitian ini dan tesis tersebut terletak pada lokasi penelitian, penyebab faktor yang melatarbelakangi praktik poligami, serta pola pikir dan perspektif masyarakat yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi Operasional, Penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

Pendahuluan dalam sebuah penelitian adalah bagian awal yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami konteks, latar belakang, dan arah dari penelitian yang dilakukan. Pendahuluan memuat gambaran umum tentang fenomena atau masalah yang akan dikaji, alasan pentingnya penelitian dilakukan, serta tujuan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, pendahuluan menggambarkan bagaimana fenomena poligami muncul dan berkembang di masyarakat pesisir Kecamatan Panyipatan, serta mengapa topik ini penting untuk ditelaah dari berbagai aspek.

Pendahuluan juga menyajikan peta permasalahan, kerangka berpikir, dan menunjukkan posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, pembaca akan memiliki pemahaman menyeluruh terhadap urgensi dan ruang lingkup penelitian yang akan dikembangkan dalam bab-bab selanjutnya.

2. BAB II Tinjauan Teoretis

Tinjauan teoretis adalah bagian penting dari penelitian yang berfungsi sebagai landasan konseptual dan teoritik dalam menganalisis fenomena yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan teoretis mencakup teori-teori yang berkaitan dengan perkawinan, poligami, keadilan dalam berpoligami, serta hukum Islam dan adat yang hidup dalam masyarakat pesisir.

Teori-teori ini akan digunakan sebagai alat analisis terhadap data lapangan mengenai praktik dan persepsi masyarakat tentang poligami. Tinjauan teoretis juga memberikan kerangka berpikir untuk memahami fenomena secara objektif dan sistematis.

3. BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian adalah komponen krusial yang menjelaskan dengan terstruktur mengenai pendekatan, strategi, serta langkah-langkah yang diterapkan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengkaji fenomena poligami secara mendalam. di masyarakat pesisir Kecamatan Panyipatan, metode menjadi

panduan untuk menelusuri fakta-fakta sosial, memahami perilaku dan persepsi masyarakat, serta menelaahnya melalui berbagai perspektif teoritis yang relevan.

Metode penelitian memiliki peran penting tidak hanya sebagai pedoman teknis pelaksanaan penelitian, tetapi juga sebagai dasar untuk membenarkan pilihan pendekatan yang digunakan. Di dalamnya mencakup penjabaran tentang jenis pendekatan yang diambil, teknik pengumpulan data, metode analisis, lokasi penelitian, serta jaminan terhadap validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Dalam konteks penelitian ini, metode penelitian difungsikan untuk merinci bagaimana data diperoleh secara langsung dari para pelaku poligami, para istri mereka, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang memiliki peran signifikan di lingkungan pesisir. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling tepat dalam menggali pengalaman, persepsi, dan nilai-nilai yang melandasi praktik poligami di tengah masyarakat. Teknik wawancara mendalam memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang bersifat subjektif dan personal, sementara observasi lapangan memberikan konteks empiris terhadap realitas sosial yang berlangsung. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami bukan hanya bagaimana praktik poligami dilakukan, tetapi juga bagaimana masyarakat memberikan makna terhadap praktik tersebut—apakah sebagai bentuk kepatuhan terhadap agama, strategi sosial-ekonomi, atau justru bentuk ketimpangan relasi gender. Dengan demikian, metode ini memperkuat kedalaman analisis dan relevansi temuan terhadap dinamika sosial yang diteliti. Dengan demikian, metode menjadi landasan penting dalam menyusun keseluruhan laporan penelitian, sekaligus memperkuat keilmiahan dan objektivitas hasil penelitian.

4. BAB IV Sajian Data dan Analisis Hasil

Penjelasan hasil penelitian dilakukan melalui pendekatan fenomenologis yang mencakup latar belakang kehidupan, proses perkawinan,

gambaran pengalaman, makna pengalaman, serta tema-tema yang muncul dari pengalaman para partisipan.

Penyajian data dan analisis hasil merupakan bagian penting dalam penelitian yang menyajikan temuan lapangan secara sistematis dan terstruktur, lengkap dengan interpretasi atau analisis terhadap data tersebut. Data yang disajikan dapat berupa kutipan wawancara, hasil observasi, tabel, narasi, maupun dokumentasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Sedangkan analisis hasil bertujuan untuk mengkaji, menafsirkan, dan memberi arti pada data yang telah dikumpulkan agar dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, sajian data menyertakan narasi pengalaman pelaku poligami, pandangan para istri, serta persepsi tokoh masyarakat. Setiap informasi yang diperoleh dari informan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan seperti teori perkawinan, keadilan dalam poligami, dan hukum Islam serta adat

5. BAB IV Penutup

BAB IV memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian serta analisis terkait praktik poligami di masyarakat pesisir Kecamatan Panyipatan. Pada bagian ini juga disajikan beberapa poin penting yang menjadi ringkasan temuan penelitian serta rekomendasi berdasarkan pelaksanaan penelitian tersebut. Hasil penelitian mengenai praktik dan persepsi poligami di masyarakat pesisir Kecamatan Panyipatan, maka saran-saran diajukan sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan praktik sosial keagamaan di masyarakat

Diharapkan untuk lebih memahami syarat dan ketentuan dalam praktik poligami berdasarkan hukum Islam, hukum negara, dan etika sosial yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi keluarga dan masyarakat.